

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi perilaku merupakan cabang atau bagian dari akuntansi yang menitikberatkan pada hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi manajemen. Jadi akuntansi perilaku mempunyai lingkup yang luas yang memperhatikan perilaku manusia dan hubungannya dengan rancangan bentuk dan kegunaan sistem informasi akuntansi (Suparwati, 2005). Salah satu bagian dari literatur akuntansi keperilakuan (*behavioral accounting*) adalah bagian yang membahas hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Argyris (1964) dalam Mpaata dan Handoko (1998) menyatakan partisipasi sebagai alat untuk mencapai tujuan, partisipasi juga sebagai alat untuk mengintegrasikan kebutuhan individu dan organisasi. Sehingga partisipasi dapat diartikan sebagai berbagi pengaruh, pendelegasian prosedur-prosedur, keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan suatu pemberdayaan.

Partisipasi yang baik membawa beberapa keuntungan sebagai berikut:

- (1) memberi pengaruh yang sehat terhadap adanya inisiatif, moralisme dan antusiasme;
- (2) memberikan suatu hasil yang lebih baik dari sebuah rencana karena adanya kombinasi pengetahuan dari beberapa individu;
- (3) dapat

meningkatkan kerjasama antara departemen; dan (4) para karyawan dapat lebih menyadari situasi di masa yang akan datang yang berkaitan dengan sasaran dan pertimbangan lain (Irvine, 1978 dalam Indriani, 1993). Hal ini mendukung pendapat Milani (1975) bahwa penyusunan anggaran secara partisipatif diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajer, yaitu ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipasi disetujui maka karyawan akan menginternalisasikan tujuan yang ditetapkan dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya, karena mereka ikut terlibat dalam penyusunan anggaran.

Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat. Hal inilah yang menjadi perbedaan dengan anggaran sektor swasta karena tidak berhubungan dengan pengalokasian dana dari masyarakat. Pada sektor publik pendanaan organisasi berasal dari pajak dan retribusi, laba perusahaan milik daerah atau negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002) dalam Akuntansi Sektor Publik, yang mengatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai

akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Proses penganggaran daerah dengan pendekatan kinerja dalam Kepmendagri No. 29 tahun 2002 memuat pedoman penyusunan rancangan APBD yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama Unit Organisasi Perangkat Daerah (unit kerja). Rancangan anggaran unit kerja dimuat dalam suatu dokumen yang disebut dengan Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK atau formulir S). RASK ini menggambarkan kerangka logis hubungan antara kebijakan anggaran (arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD) dengan operasional anggaran (program dan kegiatan anggaran) di setiap unit pelaksana anggaran daerah sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan unit kerja yang bersangkutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat (Sardjito dan Osmad Mutahaer, 2007).

Penelitian mengenai hubungan antara partisipasi dalam proses penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial merupakan penelitian yang masih banyak diperdebatkan. Beberapa penelitian mengenai hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial menunjukkan hasil yang tidak konsisten; Brownell dan Mc. Innes (1986); dan Indriantoro (1993) menemukan hubungan positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan Milani (1975); Brownell dan Hirst (1986) dalam Sukardi (2004),

dimana mereka menemukan hasil yang tidak signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial, hal ini terjadi karena hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial tergantung pada faktor-faktor situasional atau lebih dikenal dengan istilah variabel kontingensi (*Contingency Variable*).

Penyelesaian perbedaan dari beberapa penelitian yang tidak konsisten maka perlu pendekatan konsijensi (*contingency approach*). Pendekatan ini secara sistematis mengevaluasi berbagai kondisi atau variabel yang dapat mempengaruhi hubungan antara kinerja manajerial dan partisipasi penyusunan anggaran. Dengan adanya pendekatan ini, sifat hubungan yang ada dalam kinerja manajerial dan partisipasi penyusunan anggaran kemungkinan berbeda untuk setiap kondisi. Penggunaan kerangka kontinjensi memungkinkan faktor-faktor tersebut bertindak sebagai variabel moderating atau intervening yang akan mempengaruhi hubungan antara kinerja manajer dan partisipasi penyusunan anggaran (Govindarajan, 2000).

Penelitian yang dilakukan oleh Indriantoro (1993) menemukan pengaruh dimensi budaya terhadap efektivitas partisipasi dalam penyusunan anggaran dalam peningkatan kinerja manajerial.. Penelitian Susanti (2002) menunjukkan bahwa interaksi antara anggaran partisipatif dan budaya organisasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial. Budaya organisasi menjadi dasar untuk perasaan saling memahami yang dimiliki karyawan mengenai perusahaan/instansi mereka, bagaimana segala sesuatu dikerjakan berdasarkan pengertian bersama tersebut dan cara-cara

karyawan seharusnya bersikap. Instansipun harus dapat memadukan karakter-karakter budaya organisasi yang ada untuk menciptakan suatu instansi atau perusahaan dengan keanekaragaman tinggi dan pada akhirnya nanti akan meningkatkan kinerja.

Sedangkan berkaitan dengan variabel komitmen organisasi, penelitiain Randall (1990) dalam Sardjito dan Osmad Muthaher (2007) menunjukkan komitmen organisasi sebagai variabel moderating mempengaruhi secara signifikan hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial.

Komitmen organisasi menjadi hal penting bagi sebuah organisasi apapun bentuknya, karena menunjukkan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasikan keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi (Mowday, *et.al*, 1979 dalam Trisnaningsih, 2003). Oleh karena itu komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) bagi karyawan terhadap organisasi. Pentingnya karyawan yang berkomitmen tinggi pada perusahaan dikemukakan oleh Suhartono dan Mochammad Solichin (2006) yang menyatakan bahwa dengan adanya komitmen organisasi yang tinggi pada karyawan, perusahaan akan mendapatkan dampak positif seperti meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, kepastian kerja, serta menurunnya tingkat keterlambatan, absensi, dan perpindahan kerja (*turnover*). Komitmen ini bisa tumbuh disebabkan karena individu memiliki ikatan emosional dengan organisasi yang meliputi dukungan moral dan menerima nilai yang ada didalam organisasi serta tekad dari dalam organisasi untuk mengabdikan kepada

organisasi. Komitmen organisasi yang kuat menyebabkan individu berusaha mencapai tujuan organisasi dan mengutamakan kepentingan organisasi.

Hasil penelitian Sardjito dan Osmad Muthaher (2007) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel budaya organisasi dalam memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Selanjutnya terdapat pengaruh signifikan antara variabel komitmen organisasi dalam memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Artinya hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah dapat dimoderasi oleh beberapa variabel.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sardjito dan Osmad Muthaher (2007) dengan berupaya untuk meneliti kembali dengan penggunaan data dan studi kasus yang berbeda sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut, dengan mengambil judul: **Analisis Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating (Survey pada Karyawan Pemda Kabupaten Klaten).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis mencoba memunculkan permasalahan:

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah?
2. Apakah budaya organisasi dan komitmen organisasi adalah variabel moderating yang berpengaruh terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah
2. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan komitmen organisasi sebagai variabel mederating terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait guna sebagai gambaran dalam pengambilan keputusan.
2. Hasil penelitian ini dapat menambah bacaan dan memberikan sumbangan pada pengembangan penelitian di bidang akuntansi sektor publik terutama di sektor pemerintah.

3. Penelitian ini merupakan penelitian intelektual yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi keilmuan dalam disiplin yang digeluti.

E. Sistematika Penyusunan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran singkat dalam memudahkan pemahaman atas skripsi ini, perlu dijelaskan sistematika penulisan. Berikut ini penulis akan menguraikan secara garis besar penyusunan skripsi dalam perumusannya dituangkan dalam lima bab dengan tahap-tahap sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian, meliputi: partisipasi anggaran, kinerja aparat pemerintah daerah, partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah, konsep budaya organisasi, dimensi praktek budaya organisasi, pengaruh budaya organisasi dan partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi dan partisipasi penyusunan anggaran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang Ruang Lingkup Penelitian, Jenis dan Obyek Penelitian, Populasi dan Sampel, Metode Pengambilan Sampel, Metode Pengumpulan data, Variabel Penelitian, dan Metode Analisis Data.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini mencakup metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial yang diterapkan pada organisasi sektor publik serta untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan komitmen organisasi sebagai variabel mederating terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat Pemerintah Daerah

BAB V : PENUTUP

Bab ini mengemukakan tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan